



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

MENJUAL
OCEAN INSTITUTE
OF INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG



POLITEKNIK KELAUTAN
DAN PERIKANAN BITUNG
"kampus Bisnis Perikanan"



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Kompeten,
Integritas, Loyal, Adaptif, Kolaborasi

#bangga
melayani
bangsa

#2024
KKP BEYOND

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengembangan SDM KP yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bitung, 19 Januari 2026
Direktur,

Rudi Saranga



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
F. Pengungkapan Penting Lainnya	50
VI. Lampiran	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Jalan Tandurusa Kotak Pos 12/BTG – Sulawesi Utara
TELEPON (0438) 36434, 36436, FAXIMILE (0438) 21436
e-mail : ap_bitung@yahoo.co.id website : www.poltekkp-bitung.ac.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2025 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bitung, 19 Januari 2026
Direktur,

Rudi Saranga





RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2024 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur LRA Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp472,324,776,00 atau mencapai 99.56% dari estimasi Pendapatan-LRA senilai Rp474.390.000,00

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember Tahun 2025 adalah senilai Rp18.073.784.874,00 (Netto) atau mencapai 97.05 persen dari alokasi anggaran senilai Rp18.623.497,000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025. dicatat dan disajikan senilai Rp100.595.700.024,00 yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp3.767.000,00 ; Aset Tetap (netto) senilai Rp10100.327.835.871,00 ; dan Aset Lainnya (netto) senilai Rp264.097.153,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing - masing senilai Rp16.961.927,00 dan Rp100.578.738.097,00



3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025. adalah senilai Rp424.703.776,00 sedangkan jumlah beban adalah senilai (Rp21.907.964.302,00) sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp21.483.260.526,00.

Kegiatan Non Operasional Lainnya defisit senilai Rp977.401.625,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO senilai Rp22.460.662.151,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp105.428.838.399,00 dikurangi Surplus - LO senilai Rp22.460.662.151,00 ; ditambah koreksi yang menambah ekuitas senilai Rp9.101.751,00 ; ditambah Transaksi Antar Entitas senilai Rp17.601.460.098,00. Penurunan Ekuitas senilai (Rp4.850.100.302,00) ; Sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025. adalah senilai Rp100.578.738.097,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025. disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG 238010

Tgl Data : 20/01/26 7:50 AM
Tgl Cetak : 20/01/26 1:54 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	18,623,497,000	18,073,784,874	(549,712,126)	97.05	25,867,747,000	25,199,007,014	(668,739,986)	97.41
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bitung, 20 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

RUDI SARANGA
NIP 197309162002121002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (238010) POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Tgl Data : 21/01/26 2:26 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 10:34 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	3,767,000	12,321,100	(8,554,100)	(69.43)
JUMLAH ASET LANCAR	3,767,000	12,321,100	(8,554,100)	(69.43)
ASET TETAP				
Tanah	60,772,369,000	60,772,369,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	28,621,191,619	35,726,141,619	(7,104,950,000)	(19.89)
Gedung dan Bangunan	54,234,732,509	54,473,211,859	(238,479,350)	(0.44)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	7,762,402,228	7,762,402,228	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,088,533,250	1,088,533,250	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(52,151,392,735)	(55,527,681,799)	3,376,289,064	(6.08)
JUMLAH ASET TETAP	100,327,835,871	104,294,976,157	(3,967,140,286)	(3.80)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	25,000,000	25,000,000	0	0.00
Aset Lain-lain	15,690,062,376	12,073,988,026	3,616,074,350	29.95
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(15,450,965,223)	(10,939,461,265)	(4,511,503,958)	41.24
JUMLAH ASET LAINNYA	264,097,153	1,159,526,761	(895,429,608)	(77.22)
JUMLAH ASET	100,595,700,024	105,466,824,018	(4,871,123,994)	(4.62)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	16,961,927	37,985,619	(21,023,692)	(55.35)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16,961,927	37,985,619	(21,023,692)	(55.35)
JUMLAH KEWAJIBAN	16,961,927	37,985,619	(21,023,692)	(55.35)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	100,578,738,097	105,428,838,399	(4,850,100,302)	(4.60)
JUMLAH EKUITAS	100,578,738,097	105,428,838,399	(4,850,100,302)	(4.60)
JUMLAH EKUITAS	100,578,738,097	105,428,838,399	(4,850,100,302)	(4.60)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	100,595,700,024	105,466,824,018	(4,871,123,994)	(4.62)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bitung, 21 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

RUDI SARANGA
NIP 197309162002121002

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (238010) POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Tgl Data : 21/01/26 2:26 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 10:34 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	424,703,776	622,785,314	(198,081,538)	(31.806)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	424,703,776	622,785,314	(198,081,538)	(31.806)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	424,703,776	622,785,314	(198,081,538)	(31.806)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	11,642,884,731	11,494,345,656	148,539,075	1.292
Beban Persediaan	70,494,700	599,078,669	(528,583,969)	(88.233)
Beban Barang dan Jasa	5,433,783,496	9,232,939,558	(3,799,156,062)	(41.148)
Beban Pemeliharaan	866,736,750	2,450,112,024	(1,583,375,274)	(64.625)
Beban Perjalanan Dinas	47,415,605	984,224,725	(936,809,120)	(95.182)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	21,188,000	(21,188,000)	(100)

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (238010) POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Tgl Data : 21/01/26 2:26 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 10:34 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,846,649,020	4,312,682,935	(466,033,915)	(10.806)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(150,501)	150,501	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	21,907,964,302	29,094,421,066	(7,186,456,764)	(24.7)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(21,483,260,526)	(28,471,635,752)	6,988,375,226	(24.545)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(977,401,625)	0	(977,401,625)	()
Pendapatan Pelepasan Aset	47,621,000	0	47,621,000	
Beban Pelepasan Aset	1,025,022,625	0	1,025,022,625	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,961,716	(1,961,716)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,961,716	(1,961,716)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(977,401,625)	1,961,716	(979,363,341)	(49,923.809)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(22,460,662,151)	(28,469,674,036)	6,009,011,885	(21.107)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(22,460,662,151)	(28,469,674,036)	6,009,011,885	(21.107)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bitung, 21 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



RUDI SARANGA
NIP 197309162002121002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (238010) POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Tgl Data : 21/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 10:34 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	105,428,838,399	109,190,227,651	(3,761,389,252)	(3.44)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(22,460,662,151)	(28,469,674,036)	6,009,011,885	(21.11)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	9,101,751	164,125,000	(155,023,249)	(94.45)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	9,101,751	164,125,000	(155,023,249)	(94.45)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	17,601,460,098	24,544,159,784	(6,942,699,686)	(28.29)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(4,850,100,302)	(3,761,389,252)	(1,088,711,050)	28.94
EKUITAS AKHIR	100,578,738,097	105,428,838,399	(4,850,100,302)	(4.6)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bitung, 21 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

RUDI SARANGA

NIP 197309162002121002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (238010) POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Tgl Data : 21/01/26 2:26 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 10:34 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,610,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	157,000	0
0.0	131111	Tanah	60,772,369,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	28,621,191,619	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	54,234,732,509	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	3,774,252,600	0
0.0	134112	Irigasi	3,053,936,348	0
0.0	134113	Jaringan	934,213,280	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,088,533,250	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	26,836,835,084
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	23,575,895,330
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	844,188,727
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	551,574,147
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	268,099,447
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	74,800,000
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	25,000,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	15,690,062,376	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	15,450,965,223
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	16,961,927
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	18,073,784,874
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	472,324,776	0
0.0	391111	Ekuitas	0	105,428,838,399
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	9,101,751
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	5,948,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	41,673,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,000,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	414,003,776
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	7,700,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,710,050,080	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	49,569	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	256,344,514	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	65,853,058	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,080,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	421,255,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	48,793,534	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	177,066,900	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	550,720,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	60,445,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (238010) POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Tgl Data : 21/01/26 2:26 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 10:34 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	1,188,578,700	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	199,198,700	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,334	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	10,468,340	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3,060,172	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	15,540,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	11,152,680	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	34,643,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	4,350,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,660,195,344	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	224,035,806	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	590,476,479	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	159,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	81,768,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	67,267,200	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	2,500,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,932,353,940	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	80,000,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	379,259,341	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	11,293,989	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	75,170,547	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	213,535,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	598,918,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	217,667,950	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	50,000,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	47,415,605	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	929,711,433	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,713,338,679	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	98,066,382	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	71,172,206	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	23,842,833	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	10,517,487	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	52,551,450	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	150,800	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	17,033,250	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	910,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	1,025,022,625	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (238010) POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Tgl Data : 21/01/26 2:26 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 10:34 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			191,603,369,685	191,603,369,685

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bitung, 21 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

RUDI SARANGA

NIP 197309162002121002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (238010) POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Tgl Data : 21/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 10:34 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	18,073,784,874
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	472,324,776	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	5,948,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	41,673,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,000,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	414,003,776
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	7,700,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,710,050,080	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49,576	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	256,344,514	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	65,853,058	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,080,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	425,205,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	48,793,534	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	177,066,900	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	550,720,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	60,445,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	1,188,578,700	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	199,198,700	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,334	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	10,468,340	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,060,172	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15,540,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,152,680	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	34,643,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	4,350,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,660,703,264	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	224,035,806	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	590,476,479	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	159,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81,768,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	67,267,200	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,500,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,932,353,940	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	80,000,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,591,400	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	399,720,041	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	8,430,411	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (238010) POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Tgl Data : 21/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 10:34 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	78,597,117	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	213,535,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	598,918,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	217,667,950	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,500,000	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	50,000,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,415,605	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	7
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	3,950,000
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	507,920
JUMLAH			18,550,567,577	18,550,567,577

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bitung, 21 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna AnggaranRUDI SARANGA
197309162002121002



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan. Entitas berkedudukan di Jalan Raya Tandurusa, kelurahan Aertembaga II, Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Bab X Pasal 153 bahwa Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan riset dibidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung mempunyai tugas Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang kelautan dan Perikanan.

Dalam Melaksanakan tugas, Politeknik KP Bitung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran dan pelatihan dibidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
- e. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- f. pelaksanaan pembinaan karakter;
- g. pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- h. pengelolaan kesejahteraan taruna dan praktek kerja taruna serta urusan alum
- i. pelaksanaan pengawasan internal;
- j. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya; dan
- k. pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan.



Untuk mewujudkan tujuan di atas Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung berkomitmen dengan visi **“Mewujudkan Pendidikan SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten, Bermoral, Profesional, Inovatif, dan Unggul Untuk Menjadi Pusat Pendidikan Vokasi Kelautan Dan Perikanan Berdaya Saing Global Tahun 2040 Guna Mendukung Indonesia Emas Tahun 2045”**. Visi Politeknik KP Bitung merupakan cita-cita dan sekaligus tantangan yang harus diwujudkan oleh segenap civitas akademika. Visi Politeknik KP Bitung yang bersifat abstrak, menjadi lebih nyata yang dituangkan pada misi, maka misi Politeknik KP Bitung 2020 - 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengembangkan reformasi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dinamis, dan kompetitif, berstandar internasional sesuai regulasi yang berlaku guna mendukung SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
2. Penguatan riset terapan dan inovasi teknologi bidang kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
3. Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik serta kependidikan sesuai perkembangan industri dan teknologi.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi modern dengan standar internasional.
6. Menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015 serta membudayakan pelayanan prima.
7. Melaksanakan kebijakan dan tugas yang diamanatkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Kepala BPPSDM KP.

Bahwa visi yang telah dirumuskan di atas, sesungguhnya menjadi tujuan umum dari Politeknik KP Bitung. Atas dasar ini, maka **tujuan** umum Politeknik KP Bitung adalah **“ Mengelola sumberdaya manusia kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan”**

Menjalankan kebijakan dan tugas-tugas Menteri Kelautan dan Perikanan dan Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:



- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP.
- Meningkatnya SDM KP terdidik yang mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang kelautan dan perikanan.
- Terselenggaranya program pendidikan vokasi dibidang kelautan dan perikanan.
- Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui pendidikan formal.
- Terselenggaranya pengendalian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan
- Tersedianya ASN di Politeknik KP Bitung yang kompeten dan professional.
- Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Politeknik KP Bitung.
- Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Politeknik KP Bitung
- Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien di Politeknik KP.

Data Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Politeknik KP Bitung didukung oleh 69 ASN, sebagaimana Data pada SIMPEG www.ropeg.kkp.go.id Politeknik KP Bitung per 31 Desember Tahun 2025 dengan rincian sbb :

- Tenaga Fungsional Dosen sebanyak 38 Orang
- Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan 4 orang
- Fungsional Tertentu Lainnya 7 Orang
- Tenaga Fungsional Umum 21 orang
- PJLP 3 Orang

Kebijakan Pegadaan Barang dan Jasa

Satu dekade terakhir ini, teknologi informasi berkembang pesat dan mempengaruhi pasar serta pola bisnis pelaku usaha. Kebijakan perdagangan dunia yang semakin terbuka juga menuntut pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya. Situasi ini juga turut memengaruhi perubahan lingkungan strategis pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kini, pengadaan barang/jasa pemerintah semakin didorong untuk memberikan value for money dengan tidak lagi mengejar barang/jasa dengan harga termurah. Salah satu caranya adalah dengan membangun government e-marketplace. Di sisi lain, kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai pengelola pengadaan dan unit yang menangani pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional semakin tidak terelakkan. Pengelola pengadaan diharuskan memiliki kompetensi



khusus dalam bidang pengadaan melalui pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Mereka akan bekerja secara penuh waktu dalam sebuah unit kerja pengadaan barang jasa (UKPBJ) yang memiliki fungsi lengkap dan menyeluruh. Unit ini merupakan gabungan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) serta layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dengan fungsi pendukung lainnya.

Menindaklanjuti hal-hal diatas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merumuskan aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak berbelit-belit, sederhana, sehingga memberikan value for money, serta mudah dikontrol dan diawasi.

Perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 berupa perubahan struktur, istilah, definisi, dan perubahan pengaturan. Peraturan baru ini terdiri dari 15 Bab dan 94 Pasal. Strukturnya lebih disederhanakan dengan hanya mengatur hal-hal yang bersifat normatif, dan menghilangkan bagian penjelasan. Hal-hal yang bersifat standar dan prosedur selanjutnya diatur dalam Peraturan LKPP dan Peraturan kementerian teknis terkait.

Pengaturan baru meliputi: Tujuan Pengadaan, Pekerjaan Terintegrasi, Perencanaan Pengadaan, Agen Pengadaan, Konsolidasi Pengadaan, Swakelola dengan Organisasi Kemasyarakatan, Repeat Order, E-Reverse Auction, Pengecualian, Penelitian, E-Marketplace, dan Layanan Penyelesaian Sengketa.

Perubahan beberapa istilah meliputi: ULP menjadi UKPBJ, Lelang menjadi Tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, Sistem Gugur menjadi Harga Terendah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) menjadi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD), Dokumen Pengadaan menjadi Dokumen Pemilihan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menjadi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Menjadi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP). Perubahan beberapa definisi meliputi: LPSE, Swakelola, Penunjukan Langsung, Penyedia, PPHP/PjPHP, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya.

Perubahan pengaturan meliputi: Tugas PPHP/PjPHP, Persyaratan Penyedia, Ketentuan Penyebutan Merek, Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri, HPS, Jaminan Penawaran dan Sanggah Banding, Metode Pemilihan Penyedia, Jenis Kontrak, Ketentuan Kontrak Tahun Jamak, Batasan Nilai Pengadaan



Langsung Jasa Konsultansi, Pemesanan E-Purchasing, Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak, Perubahan Kontrak, Penyesuaian Harga, Penanganan Keadaan Darurat, Tender/Seleksi Internasional, UKPBJ, Perlindungan Pelaku Pengadaan, dan Pencantuman Daftar Hitam. Dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut sudah berlaku. Untuk masa transisi atas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, K/L/PD tetap dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sampai dengan 30 Juni 2018. Sedangkan kontrak yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sampai dengan kontrak berakhir. Setelah tanggal 1 Juli 2018 K/L/PD wajib melaksanakan pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh **Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung**. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui roll out SAKTI full module, dimana semua transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul General Ledger dan Pelaporan/GLP)

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



**Dasar
Pengukuran**

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan
Akuntansi**

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-LO****(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Uang Pendidikan diakui pada setiap akhir semester
 - Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat dan akhir pendidikan diakui setelah ujian selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
 - Pendapatan Jasa slipway diakui setelah selesai dilaksanakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Beban****(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%



Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ✓ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - ✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2017, tentang



Penilaian kembali BMN/BMD dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan jembatan dan bangunan air pada kementerian Negara/lembaga sesuai kodefikasi Barang milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada kementerian/lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi, dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan atau pendekatan pendapatan oleh penilai pemerintah dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa tanah, dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Nilai aset tetap penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada laporan keuangan. Namun apabila nilai aset tetap revaluasi lebih rendah dari nilai sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada laporan keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

c) **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:



- a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.



- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan
- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 - Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
 - Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Adapun anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang dikelola oleh Politeknik KP Bitung pada tahun 2025 dengan Rincian sebagai berikut :

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Pendidikan	474,390,000.00	474,390,000.00
Jumlah Pendapatan	474,390,000.00	474,390,000.00
Belanja		
Belanja Pegawai	11,477,840,000.00	11,814,543,000.00
Belanja Barang	13,179,960,000.00	6,808,954,000.00
Belanja Modal	0.00	0.00
Jumlah Belanja	24,657,800,000.00	18,623,497,000.00

Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat 4 kali Revisi Dja

- Revisi Tanggal 21 Februari 2025, Revisi Anggaran terkait efisiensi belanja
- Revisi Tanggal 9 April 2025, Revisi Relaksasi blokir anggaran
- Revisi tanggal 16 Juli 2025, Revisi Rekomposisi anggaran BPPSDMKP
- Revisi tanggal 2 September 2025, Revisi ANgggaran untuk revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan KP
- Revisi tanggal 20 November 2025, revisi belanja pegawai

Revisi Kewenangan Kanwil Perbendaharaan sebanyak 3 kali, terkait revisi Halaman 3 DIPA

Revisi Kewenangan KPA sebanyak 7 kali, terkait pemenuhan belanja uang makan taruna, efisiensi belanja dan revisi pagu minus belanja pegawai.

Realisasi Pendapatan
Rp472.324.776,00

B.1 Pendapatan

Kebijakan pengelolaan Pendapatan berpedoman pada PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp472.324.776,00 atau mencapai 99.56 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp474.390.000,00 Pendapatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, terdiri dari Pendapatan Pendidikan dan PNBPN lainnya.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:



Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025

Akun	Uraian Pendapatan	Target	31 Desember 2024	%
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	207,790,000	414,003,776	199.24
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan			0.00
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	9,000,000	Rp 7,700,000	85.56
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	33,600,000		0.00
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	104,000,000		0
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan Peternakan dan Budidaya	120,000,000		0
425122	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin		5,948,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		41,673,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan bangunan		3,000,000	0
TOTAL PNBP		474,390,000	472,324,776	99.56

Adapun rincian Pendapatan sbb :

*** Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasaranan sesuai dengan Tusi**

- Kegiatan Tefa Docking kapal senilai Rp. 212.175.294,00

- Kegiatan Tefa ABF dan Cold Storage senilai Rp. 119.445.250,00

- Sewa Balai Taruna senilai Rp. 750.000,00

- Sewa Rumah Dinas senilai Rp. 81.633.232,00 yang dipotong melalui pembayaran SPM Gaji Induk setiap bulan.

*** Pendapatan Uang Pendidikan** merupakan setoran uang pendidikan dari peserta didik tingkat III yang lulus pada bulan Juli 2025, yang diterima melalui jalur umum senilai Rp. 7.700.000,00

*** Pendapatan pemanfaatan BMN, terdiri dari**

❖ Pendapatan Sewa tanah, gedung dan bangunan

- Sewa Tanah untuk ATM BRI Rp3.000.000,00, NTPN EFAB87QLUFGIJ130

*** Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan mesin** merupakan pendapatan atas penjualan melalui dilelang KPKNL berupa peralatan dan mesin set long line, simulator navigasi, simulator GMDSS, dan nugget forming machine senilai Rp.5.948.000,00

*** Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya** merupakan penjualan melalui lelang KPKNL berupa hasil bongkaran Gedung Asrama flipper senilai Rp.41.673.000,00



Perbandingan Realisasi Pendapatan 2025 dan 2024

Akun	Uraian Pendapatan	2025	2024	Naik / Turun (Rp)
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	414,003,776	315,037,650	98,966,126
425122	Pendapatan dari Penjualan peralatan dan mesin	5,948,000		5,948,000
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	7,700,000	7,800,000	- 100,000
425421	Pendapatan Layanan pendidikan dan atau pelatihan		21,975,000	- 21,975,000
425112	Pendapatan Penjualan hasil pertanian,perkebunan,peternakan dan budidaya		177,621,000	- 177,621,000
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya		12,086,000	- 12,086,000
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,000,000	88,265,664	- 85,265,664
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		30,640,200	- 30,640,200
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		1,421,716	- 1,421,716
425129	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya	41,673,000		41,673,000
TOTAL PNBP		472,324,776	654,847,230	- 182,522,454

Realisasi Belanja Negara Rp18.073.784.874,00 (Netto)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp18.073.784.874,00 atau 97,05 persen dari anggaran belanja (setelah revisi) senilai Rp18.623.497.000,00

Adapun Rincian anggaran dan realisasi belanja selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	2024		
	Pagu Setelah Revisi	Realisasi 31 Desember 2024	% Real Angg.
Belanja Pegawai	11,814,543,000.00	11,647,342,658.00	98.58
Belanja Barang	6,808,954,000.00	6,430,900,143.00	94.45
Belanja Modal	0	0	-
Total Belanja Kotor	18,623,497,000.00	18,078,242,801.00	97.07
Pengembalian Belanja	-	4,457,927.00	
Total Belanja Bersih	18,623,497,000.00	18,073,784,874.00	97.05



Realisasi Belanja TA 2025 **Turun** senilai **28.28 persen** dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran atas kebijakan pemerintah serta blokir pagu anggaran PNBPN yang tidak dapat direalisasikan.

Perbandingan Realisasi Belanja 2024 dan 2023

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	11,642,884,731.00	11,494,345,656.00	1.29
Belanja Barang	6,430,900,143.00	13,212,382,058.00	(51.33)
Belanja Modal	-	492,279,300.00	(100.00)
Jumlah Bersih	18,073,784,874.00	25,199,007,014.00	(28.28)

Belanja Pegawai

Rp11.642.884.731,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp.11.642.884.731,00 dan Rp11.494.345.656,00 Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan senilai 1,23 persen dari TA 2024, dikarenakan adanya penambahan Pegawai PPPK yang baru sebanyak 8 orang.



*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2025 dan 2024*

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) Rp
Belanja Gaji Pokok PNS	3,710,050,080	3,628,358,677	2.25
Belanja Pembulatan Gaji PNS	49,576	47,598	4.16
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	256,344,514	246,075,530	4.17
Belanja Tunj. Anak PNS	65,853,058	62,958,232	4.60
Belanja Tunj. Struktural PNS	1,080,000	1,080,000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	425,205,000	419,305,000	1.41
Belanja Tunj. PPh PNS	48,793,534	46,124,518	5.79
Belanja Tunj. Beras PNS	177,066,900	171,997,500	2.95
Belanja Uang Makan PNS	550,720,000	527,288,000	4.44
Belanja Tunjangan Umum PNS	60,445,000	62,175,000	(2.78)
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	1,188,578,700	1,075,214,600	10.54
Belanja Gaji Pokok PPPK	199,198,700	121,122,200	64.46
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,334	2,221	95.14
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	10,468,340	4,006,920	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,060,172	801,384	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15,540,000	14,070,000	10.45
Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,152,680	4,490,040	148.39
Belanja Uang Makan PPPK	34,643,000	18,674,000	85.51
Belanja Tunjangan Umum PPPK	4,350,000		
Belanja Uang Lembur		88,476,000	(100.00)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	4,660,703,264	4,877,392,192	(4.44)
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja PPPK	224,035,806	133,323,129	68.04
Total	11,647,342,658	11,502,982,741	1.25
Pengembalian Belanja	4,457,927	1,295,886	
Realisasi Netto	11,642,884,731	11,501,686,855	1.23

Pengembalian belanja pegawai merupakan

- Pembulatan minus senilai Rp7,00
- Pengembalian tunjangan fungsional senilai Rp3.950.000,00 sehubungan dengan kelebihan pembayaran tunjangan Dosen yang ditugaskan sebagai Direktur an. IGP Gede Rumayasa Yudana, yang menjadi Dosen di Politeknik KP Sidoarjo
- Pengembalian tunjangan kinerja senilai Rp507.920,00 atas pegawai fungsional umum yang mutase ke jabatan fungsional dosen.



Belanja Barang
Rp6.430.900.143,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp. 6.430.900.143,00 dan Rp13.212.382.058,00. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan senilai 51.33 persen dari Realisasi Belanja Barang periode TA 2024 sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran atas kebijakan pemerintah dan blokir pagu Anggaran PNBPN yang tidak dapat digunakan.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	672,403,479.00	5,024,799,285.00	(86.62)
Belanja Barang Non Operasional	4,002,121,140.00	3,257,982,530.00	22.84
Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	80,000,000.00		
Belanja Barang Persediaan	60,591,400.00	523,780,149.00	(88.43)
Belanja Jasa	700,282,569.00	972,528,625.00	(27.99)
Belanja Pemeliharaan	868,085,950.00	2,483,166,744.00	(65.04)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	47,415,605.00	984,754,725.00	(95.19)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	6,430,900,143.00	13,247,012,058.00	(51.45)
Pengembalian Belanja	-	34,630,000.00	
Jumlah Belanja	6,430,900,143.00	13,212,382,058.00	(51.33)



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp, 00,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 Des 2025	31 Des 2024
Uang Tunai di Brankas	-	-
Saldo Rekening Giro (BRI)	-	-
Kuitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

Catatan : selisih lebih Rp0 , karena tidak ada pecahan uang kecil

Sisa UP senilai Rp. 80.610,00 disetor tanggal 24 Desember 2025 dengan kode billing 702512244102287 , NTPN B92AE2CPTTEL4V54F

Sedangkan sisa TUP senilai Rp. 4.662.000,00 disetor tanggal 24 Desember 2025, dengan kode Billing 702512244102316, NTPN 02E80397D97HC55C

Persediaan Rp3.767.000,00

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp.3.767.000,00 dan Rp12.231.100,00 .

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	2025	2024
Barang Konsumsi	3,610,000.00	9,494,600.00
Barang untuk Pemeliharaan		
Suku Cadang		
Bahan Baku	157,000.00	2,826,500.00
Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat		
Persediaan Lainnya		
Jumlah	3,767,000.00	12,321,100.00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik Persediaan akhir berupa ATK, computer supplies, BBM Genset, obat-obatan dan bahan praktek.

**Tanah**

Rp.60.772.369.000,00

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing Rp60.772.369.000,00 dan Rp60.772.369.000,00, tidak mengalami perubahan nilai.

Rincian kepemilikan sertipikat :

- Sertifikat Hak Pakai No. 13 Tahun 1995 seluas 961 m2, Lokasi Jl. Pramuka, Sario-Manado, atas nama Pemerintah RI.Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPSDM-KP, APB.
- Sertifikat Hak Pakai No. 8 Tahun 1995 seluas 109.345 m2, lokasi Jl. Tandurusa, Aertembaga Bitung, atas nama Pemerintah RI, cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPSDM-KP, APB.
- Sertifikat Hak Pakai No. 00010 seluas 9.448m2, lokasi Jl. Tandurusa, Aertembaga Bitung, atas nama Pemerintah RI, cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ganti Nama berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN RI No. 86/PMK.06/2009, No. 24 Tahun 2009, tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah dan Naskah Serah Terima Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Pertanian yang dialihkan / diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 09 Desember 2016 (307:6833/2016 ; 208:3869/2016)
- Sertifikat Hak Pakai No. 00011 seluas 39.820m2, lokasi Jl. Tandurusa, Aertembaga Bitung, atas nama Pemerintah RI, cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ganti Nama berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN RI No. 86/PMK.06/2009, No. 24 Tahun 2009, tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah dan Naskah Serah Terima Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Pertanian yang dialihkan / diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 09 Desember 2016 (307:6832/2016 ; 208:3868/2016).

Penetapan Status Tanah Politeknik KP Bitung dalam proses penerbitan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sambil menunggu proses pembuatan Keputusan Menteri Keuangan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



Peralatan dan Mesin
Rp28.621.191.619,00

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.28.621.191.619,00 dan Rp35,726,141,619,00 , atau berkurang senilai Rp7.104.950.000,00

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	35,726,141,619.00
Mutasi tambah:	440,467,600.00
Reklasifikasi Masuk	440,467,600.00
Pengembangan Nilai Aset	0.00
Mutasi kurang:	7,545,417,600.00
Reklasifikasi Keluar (salah catat kode barang)	440,467,600.00
Reklasifikasi dari Aset tetap ke Aset lainnya	7,104,950,000.00
Saldo per 31 Desember 2025	28,621,191,619.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	26,836,835,084.00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1,784,356,535.00

Mutasi Tambah berupa :

No.	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi masuk atas Koreksi kesalahan pemilihan kode barang, Surat Keterangan No. B.288/POLTEK.BTG/PL.760/II/2025, tanggal 28 Februari 2025	188,999,300
2	Reklasifikasi masuk atas Koreksi kesalahan pemilihan kode barang alat persenjataan, Surat Keterangan No. B.1457/POLTEK.BTG/PL.760/X/2025, tanggal 2 Oktober 2025	251,468,300
Jumlah		440,467,600

Mutasi Kurang berupa :

No.	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi keluar atas Koreksi kesalahan pemilihan kode barang, Surat Keterangan No. B.288/POLTEK.BTG/PL.760/II/2025, tanggal 28 Februari 2025	188,999,300
2	Reklasifikasi keluar atas Koreksi kesalahan pemilihan kode barang alat persenjataan, Surat Keterangan No. B.1457/POLTEK.BTG/PL.760/X/2025, tanggal 2 Oktober 2025	251,468,300
3	Reklasifikasi keluar dari Aset Tetap ke Aset Lainnya dalam rangka usulan penghapusan BMN, Surat Usulan No. B.693/POLTEK.BTG/PL.760/VI/2025, tanggal 25 Juni 2025	6,971,450,000
4	Reklasifikasi keluar dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Rekondisi Aset berupa Kendaraan Roda 4 dan Roda 2, Surat Usulan No. B.1364/POLTEK.BTG/PL.760/IX/2025, tanggal 8 September 2025	133,500,000
Jumlah		7,545,417,600



Gedung dan Bangunan
Rp54.234.732.509,00

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 54.234.732.509,00 dan Rp54.473.211.859,00. Atau berkurang senilai Rp238.479.350,00.

Mutasi nilai Gedung dan bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	54,473,211,859.00
Mutasi tambah:	0.00
Pembelian	0.00
Perolehan	0.00
Pengembangan Nilai Aset	0.00
Mutasi kurang:	238,479,350.00
Reklasifikasi keluar	238,479,350.00
Koreksi Kesalahan input IP	0.00
Saldo per 31 Desember 2025	54,234,732,509.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	23,575,895,330.00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	30,658,837,179.00

Mutasi kurang adalah reklasifikasi keluar atas gedung bangunan yang sudah rusak berat senilai Rp238.479.350,00 , dengan Nomor BA Inventarisasi Bangunan Rusak Berat No. B.1411/POLTEK.BTG/PL.760/IX/2025, tanggal 22 September 2025. Politeknik KP Bitung mempunyai 79 unit gedung dan bangunan senilai Rp39.872.079.284,00 , namun yang telah memiliki IMB sebanyak 4 unit senilai Rp5.069.336.000,00 semuanya berlokasi di Bitung dengan rincian sebagai berikut

No	Kode Barang	Nama Bangunan	Nilai Buku (Rp)	Nomor IMB
1	4010101001.4	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Administrasi Pendidikan)	3.745.541.000,00	01/IMB/BPPT&PMD/0147/X/2013
2	4010103001.3	Bangunan Bengkel Kapal (Dock Sleep Way Yard)	155.766.000,00	85/IB Thn.2010
3	4010103001.4	Bangunan Fishing Gear	439.607.000,00	01/IMB/BPPT&PMD/02/VI Thn 2012
4	4010103001.5	Workshop Teknologi Mesin Perikanan	728.422.000,00	071/IB Thn.2012
JUMLAH			5.069.336.000,00	

Sedangkan untuk gedung bangunan yang berlokasi di Bitung lainnya masih dalam proses dan sudah pada tahap penerbitan Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung dengan nomor surat 514/KRK-DPUPR/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018. Adapun gedung dan bangunan yang berlokasi Stasiun Kampus Manado sementara berproses di Pemerintah Kota Manado.



Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp7.762.402.228,00

C.8 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp7,762,402,228,00 dan Rp7,762,402,228,00

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	7,762,402,228.00
Mutasi tambah:	0.00
Pembelian	0.00
Transfer Masuk	0.00
Pengembangan Nilai Aset	0.00
Mutasi kurang:	0.00
Koreksi Kesalahan input IP	0.00
Saldo per 31 Desember 2025	7,762,402,228.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	1,663,862,321.00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	6,098,539,907.00

Aset Tetap Lainnya
Rp1.088.533.250,00

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp1.088.533.250,00 dan Rp1.088.533.250,00, Tidak ada transaksi, baik mutase tambah maupun kurang.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1,088,533,250.00
Mutasi tambah:	0.00
Pembelian	0.00
Transfer Masuk	0.00
Pengembangan Nilai Aset	0.00
Mutasi kurang:	0.00
Koreksi Kesalahan input IP	0.00
Saldo per 31 Desember 2025	1,088,533,250.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	74,800,000.00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1,013,733,250.00



Aset Tak Berwujud
Rp25.000.000,00

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp25.000.000,00 dan Rp25.000.000,00 .

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor yakni e-library.

Aset Lain-lain
Rp15.690.062.376,00

C.11 Aset Lain Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. Rp12.073.988.026,00 dan Rp12.073.988.026,00

Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dalam kondisi rusak berat. Terdapat kenaikan senilai Rp3.616.074.350,00

Mutasi Aset Lain –lain sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	12,073,988,026.00
Mutasi tambah:	7,343,429,350.00
Penghentian aset dari penggunaan	7,343,429,350.00
Transfer Masuk	0.00
Pengembangan Nilai Aset	0.00
Mutasi kurang:	3,727,355,000.00
Penghapusan aset	3,727,355,000.00
Saldo per 31 Desember 2025	15,690,062,376.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	15,450,965,223.00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	239,097,153.00

Penambahan nilai asset lain berupa

No.	Uraian	Jumlah
1	Penghentian Aset dari Penggunaan BA Inventaris NOMOR B.693/POLTEK.BTG/PL,760/VI/2025 , tanggal 20 Juni 2025	6,971,450,000
2	Reklasifikasi masuk dari Aset Tetap (Gedung bangunan) Nomor B.1411/POLTEK.BTG/PL.760/IX/2025, tgl.22 September 2025. usul penghapusan RN dan Kolam	238,479,350
3	Reklasifikasi masuk dari Aset Tetap (Peralatan dan Mesin) Nomor B.1364/POLTEK.BTG/PL.760/IX/2025, tgl.8 September 2025. usul penghapusan Kendaraan Roda 4 dan roda 2 yang rusak berat	133,500,000
Jumlah		7,343,429,350



Mutasi kurang Aset lain berupa

No.	Uraian	Jumlah
1	Pencatatan barang yang akan dihapus Keputusan Menteri KP tentang penghapusan BMN NOMOR 900/KEPMEN-KP/PL.750/VI/2025, tanggal 11 Juni 2025	3,727,355,000
Jumlah		3,727,355,000

Akumulasi
 penyusutan/Amortisasi
 Aset Lainnya
 (Rp15.450.965.223,00)

C.12 Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi penyusutan / amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah (Rp15.450.965.223,00) dan (Rp10,939.461.265,00)

Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-lain.

Utang kepada Pihak Ketiga
 Rp16.961.927,00

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.16.961.927,00 dan Rp37,985,619,00
 Saldo Utang kepada pihak ketiga merupakan tagihan listrik dan internet bulan Desember 2025 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2026.

Ekuitas
 Rp100.578.738.097,00

C.14 Ekuitas

Ekuitas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp.100.578.738.097 dan Rp105.428.838.399,00.
 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

Rp424.703.776,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp.424.703.776,00 dan Rp 622,785,314,00
Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024

Akun	Uraian Pendapatan	2025	2024	Naik / Turun (Rp)
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	414,003,776	315,037,650	31.41
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	7,700,000	7,800,000	(1.28)
425421	Pendapatan Layanan pendidikan dan atau pelatihan		21,975,000	(100.00)
425112	Pendapatan Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya		177,621,000	(100.00)
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya		12,086,000	(100.00)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,000,000	88,265,664	(96.60)
TOTAL PNBP		424,703,776	622,785,314	(31.81)

Nilai PNBP 31 Desember 2025 turun 31.81% persen dibandingkan periode yang sama ditahun 2024. Penurunan realisasi PNBP dikarenakan terdapat kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaksanakan sehubungan dengan pagu anggaran untuk pengadaan BBM praktek laut yang bersumber dari PNBP yang diblokir senilai Rp351.048.000,00.

* **Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi**

- Kegiatan Tefa Docking kapal senilai Rp. 212.175.294,00
- Kegiatan Tefa ABF dan Cold Storage senilai Rp. 119.445.250,00
- Sewa Balai Taruna senilai Rp. 750.000,00
- Sewa Rumah Dinas senilai Rp. 81.633.232,00 yang dipotong melalui pembayaran SPM Gaji Induk setiap bulan.



* **Pendapatan Pendidikan**

- merupakan setoran uang pendidikan dari peserta didik tingkat III yang lulus pada bulan Juli 2025, yang diterima melalui jalur umum senilai Rp.7.700.000,00.

* **Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan** merupakan sewa tanah untuk ATM BRI bulan Januari sd. Desember 2025 senilai Rp3.000.000,00

Beban Pegawai
Rp11,642.884.731,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp.11.642.884.731,00 dan Rp11,494,345,656,00 . Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	3,710,050,080.	3,628,358,677	2.25
Beban Pembulatan Gaji PNS	49,569.	46,453	6.71
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	256,344,514.	246,075,530	4.17
Beban Tunj. Anak PNS	65,853,058.	62,958,232	4.60
Beban Tunj. Struktural PNS	1,080,000.	-	#DIV/0!
Beban Tunj. Fungsional PNS	421,255,000.	416,605,000	1.12
Beban Tunj. PPh PNS	48,793,534.	46,124,518	5.79
Beban Tunj. Beras PNS	177,066,900.	171,997,500	2.95
Beban Uang Makan PNS	550,720,000.	527,288,000	4.44
Beban Tunjangan Umum PNS	60,445,000.	60,880,000	(0.71)
Beban Tunjangan Profesi Dosen	1,188,578,700.	1,075,214,600	10.54
Beban Gaji Pokok PPPK	199,198,700.	121,122,200	64.46
Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,334.	2,221	95.14
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	10,468,340.	4,006,920	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	3,060,172.	801,384	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	15,540,000.	14,070,000	10.45
Beban Tunjangan Beras PPPK	11,152,680.	4,490,040	148.39
Beban Uang Makan PPPK	34,643,000.	18,674,000	85.51
Beban Tunjangan Umum PPPK	4,350,000.		
Beban Uang Lembur		88,476,000	(100.00)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	4,660,195,344.	4,873,831,252	(4.38)
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja PPPK	224,035,806.	133,323,129	68.04
Jumlah	11,642,884,731.00	11,494,345,656.00	1.29

Beban Persediaan
Rp70.494.700,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp70.494.700,00 dan Rp599,078,669,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



*Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	52,551,450.00	255,568,424.00	(79.44)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan			-
Beban Persediaan Suku Cadang			-
Beban Persediaan Bahan Baku	17,033,250.00	212,886,645.00	(92.00)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat			-
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat			-
Beban Persediaan Lainnya	910,000.00	130,623,600.00	(99.30)
Jumlah Beban Persediaan	70,494,700.00	599,078,669.00	(88.23)

Adapun rincian yang membentuk beban persediaan sbb :

Saldo Awal Persediaan	12,321,100	
Belanja Persediaan	60,591,400	
Belanja persediaan pemeliharaan alsin	1,500,000	
		74,412,500
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	150,800	
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	
Saldo Akhir Persediaan	3,767,000	
		3,917,800
Beban Persediaan		70,494,700

- Belanja persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin merupakan pengadaan BBM untuk genset, akun 523123.
- Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang merupakan pembelian persediaan bahan praktek Prodi MP membentuk beban pemeliharaan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp5.433.783.496,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp.5.433.783.496,00 dan Rp9,232,939,558,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	590,476,479.00	786,887,810.00	-24.96
Beban Pengadaan Bahan Makanan		4,089,906,800.00	0.00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	159,000.00	714,000.00	-77.73
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	81,768,000.00	101,388,000.00	-19.35
Beban Barang Operasional Lainnya		45,902,675.00	-100.00
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	80,000,000.00		0.00
Beban Bahan	67,267,200.00	589,780,730.00	-88.59
Beban Honor Output Kegiatan	2,500,000.00		0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,932,353,940.00	2,634,101,800.00	49.29
Beban Langganan Listrik	379,259,341.00	448,539,162.00	-15.45
Beban Langganan Telepon	11,293,989.00	15,985,694.00	-29.35
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	75,170,547.00	83,785,887.00	-10.28
Beban Sewa		24,847,000.00	0.00
Beban Jasa Lainnya			
Jumlah	5,433,783,496.00	9,232,939,558.00	-41.15

Terdapat perbedaan antara Belanja barang dan jasa pada LRA dan LO, senilai Rp21.023.692,00 dengan rincian sbb :

Jenis Tagihan	Jumlah
Beban 2024 yang belum dibayar (Tagihan Listrik bulan Desember 2024 dibayar pada bulan Januari 2025)	37,985,619
Tagihan Listrik bulan Desember 2025 dibayar tahun 2026	16,961,927
Selisih	- 21,023,692

*Beban Pemeliharaan
Rp866.736.750,00*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp.866.736.750,00 dan Rp2,450,112,024,00 .

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	598,918,000.00	1,419,265,900.00	-57.80
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	217,667,950.00	804,771,444.00	-72.95
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			
Beban Pemeliharaan Jaringan	50,000,000.00	225,697,400.00	-77.85
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	150,800.00	377,280.00	-60.03
Beban Persediaan Suku Cadang			#DIV/0!
Jumlah	866,736,750.00	2,450,112,024.00	-64.62

Terdapat perbedaan antara realisasi belanja pemeliharaan pada LRA dan LO, senilai Rp150.800,00 ; dengan rincian sbb :

No.	Jenis Tagihan	Jumlah
1	Belanja Persediaan membentuk Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan (berupa bahan praktek mesin)	150,800
Total		150,800

Beban Perjalanan Dinas
Rp47.415.605,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp.47.415.605,00 dan Rp984,224,725,00.

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	47,415,605.00	966,066,725.00	-95.09
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		12,158,000.00	-100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		6,000,000.00	-100.00
Jumlah	47,415,605.00	984,224,725.00	-95.18

Tidak terdapat selisih antara LRA dan LO.



Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp3.846.649.020,00

D.8. Beban Penyusutan

Jumlah Beban penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp. 3.846.649.020,00 dan Rp4.312.682.935,00 .

Beban Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian atas Beban penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	929,711,433.00	610,550,314.00	52.27
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,713,338,679.00	1,450,562,737.00	87.05
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	98,066,382.00	49,033,191.00	100.00
Beban Penyusutan Irigasi	71,172,206.00	38,564,595.00	84.55
Beban Penyusutan Jaringan	23,842,833.00	11,921,415.00	100.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	10,517,487.00	3,955,883.00	0.00
Jumlah	3,846,649,020.00	4,312,682,935.00	-10.81

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
(Rp977.401.625,00)

D.10 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2023	2024	NAIK (TURUN) %
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	Rp 47,621,000	Rp -	-
Pendapatan pelepasan aaset non lancar	Rp 47,621,000	Rp -	-
PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	1,025,022,625.00	1,961,716.00	-
PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERA	-	1,961,716.00	-
Beban pelepasan aset	1,025,022,625.00	-	-
Pendapatan perolehan aset lainnya	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIOAN LAINNYA	-	-	-
Beban penyesuaian Nilai persediaan	-	-	-
Jumlah	(977,401,625.00)	1,961,716.00	(49,924)



- Pendapatan pelepasan asset merupakan hasil penjualan atas lelang bongkaran gedung Asrama Fliper senilai Rp47.621.000,00
- Beban pelepasan asset senilai Rp1,025,022,625 merupakan transaksi penghapusan asset gedung asrama flipper senilai Rp3.727.355.000,00 dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp2,702,332,375,00



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp105.428.838.399,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada LPE per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp105.428.838.399,00 dan Rp109.190.227.651,00

Defisit LO

(Rp 22.460.662.151,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai (Rp22.460.662.151,00) dan (Rp28.469.674.036,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Yang

Menambah/

mengurangi ekuitas

Rp9.101.751,00

E.3. Koreksi Yang Menambah/mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang Menambah/mengurangi ekuitas pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp.9.101.751,00 dan Rp164.125.000,00.

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas merupakan Koreksi nilai asset non revaluasi yang terbentuk melalui jurnal asset pada saat pencatatan transaksi reklasifikasi masuk dan keluar atas kesalahan pemilihan kode barang.

Transaksi Antar Entitas

Rp17.601.460.098,00

E.4. Transaksi Antar Entitas.

Transaksi Antar Entitas pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp17.601.460.098,00 dan Rp24,544,159,784,00.

Transaksi antar entitas meliputi :

- Ditagihkan ke entitas lain merupakan total realisasi belanja (Netto) senilai Rp 18.073.784.874,00
- Diterima dari entitas lain merupakan total pendapatan senilai (Rp472.324.776,00)

Ekuitas Akhir

Rp100.578.738.097,00

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp.100.578.738.097,00 dan Rp105.428.838.399,00 .



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

Capaian Output

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG (238010) DATA CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2025

Periode : Triwulan IV

KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)				
		Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	S.d Bulan Ini		
							RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)
DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI								
2376	PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								
PDE 541	Akreditasi Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan	22,850,000	18,700,000	81.84	1	UnitKerja	1	1	100
SAC 811	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	4,731,505,000	4,374,713,945	92.46	362	Orang	383	362	100
WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL								
2378	DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP BRSDMKP								
EBA962	Layanan Umum	3,886,000	3,875,600	99.73	1	Layanan	1	1	100
EBA994	Layanan Perkantoran	13,861,367,000	13,672,621,736	98.64	1	Layanan	1	1	100
EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	3,889,000	3,873,600	99.60	1	Dokumen	1	1	100

Pejabat Perbendaharaan

Terjadi pergantian Kuasa Pengguna Anggaran sehubungan dengan pergantian Direktur Politeknik KP Bitung pada bulan Agustus 2025 dari IGP Gede Rumayasa Yudana kepada Rudi Saranga, sebagaimana Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran Nomor KEP 31/PA/2025, tanggal 4 September 2025,

Pengelolaan Belanja

- Terdapat Belanja 521252 Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel senilai Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) untuk pengadaan kursi ruang makan taruna dan kursi ruang kelas.
- Terdapat koreksi SPM belanja Gaji Induk Pegawai bulan Januari s.d. Maret 2025 atas perubahan akun Pendapatan sewa rumah dinas dari akun semula 425131 menjadi akun 425151

Pengelolaan Barang Milik Negara

- Penetapan Status BMN ; Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :
 1. Nomor 451/KEPMENKP/SJ/PL.940/2019 Tanggal 24 Juni 2019 untuk aset tetap lainnya
 2. Nomor 592/KEPMENKP/SJ/PL.930/2019 Tanggal 9 Agustus 2019 Untuk Aset Jalan Irigasi Jaringan



3. Nomor 593/KEPMENKP/SJ/PL.930/2019 Tanggal 9 Agustus 2019 untuk Aset Tak Berwujud
 4. Nomor 631/KEPMENKP/SJ/PL.930/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 untuk Aset Peralatan dan Mesin
 5. Nomor 259/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 Tanggal 27 Oktober 2020
 6. Nomor 260/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 Tanggal 27 Oktober 2020
 7. Nomor 261/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 Tanggal 27 Oktober 2020
 8. Nomor 262/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 Tanggal 27 Oktober 2020
 9. Nomor 286KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 Tanggal 30 November 2020
 10. Nomor 287/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 Tanggal 30 November 2020
 11. Nomor 288/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 Tanggal 30 November 2020
 12. Nomor 21/KM.6/WKN.16/KNL.01/2021 Tanggal 10 Februari 2021
 13. Nomor 29/KM.6/WKN.16/KNL.01/2021 Tanggal 17 Februari 2021
 14. Nomor 22/KM.6/WKN.16/KNL.01/2021 Tanggal 10 Februari 2021
 15. Nomor 23/KM.6/WKN.16/KNL.01/2021 Tanggal 10 Februari 2021
 16. Nomor 98/KEPMENKP/SJ/PL.930/2021 Tanggal 21 Maret 2021
 17. Nomor 36/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 Tanggal 20 Februari 2020
 18. Nomor 909/KEPMEN-KP/SJ/PL.710/VI/2025, tanggal 12 Juni 2025
- Barang Milik Negara (BMN) Politeknik Kelautan dan Perikanan yang belum di usulkan kan Penetapan Status Penggunaan (PSP) berupa barang ekstrakomptabel pengadaan kursi ruang makan akan diusulkan pada tahun 2026.
 - Aset yang dihentikan penggunaannya berupa alat laboratorium pendidikan lainnya (Simulator) dan diusulkan untuk penghapusan dengan surat Usulan No. B.999/POLTEK.BTG/PL.750/VII/2025, tanggal 30 Juli 2025, telah mendapat persetujuan penjualan dari Kementerian Keuangan Nomor S-8/MK/WKN.16/2025, tanggal 17 Desember 2025, dan telah dibuat surat permohonan lelang BMN kepada KPKNL Manado dengan nomor surat B.1901/POLTEK.BTG/PL.740/XII/2025, tanggal 22 Desember 2025, saat ini masih menunggu pelaksanaan proses lelang
 - Untuk Gedung Asrama Fliper telah terbit Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 900/KEPMEN-KP/PL.750/VI/2025 tentang Penghapusan BMN di lingkungan KKP yang dikelola oleh BPPSDMKP pada Politeknik KP Bitung, tanggal 11 Juni 2025.



- Masih berproses Permohonan Penerbitan SK Penghapusan atas BMN diatas 100 Juta berupa Peralatan Simulator GMDSS, alat tangkap, nugget forming, dan simulator navigasi, dengan Nomor B.8/POLTEK.BTG/PL.750/1/2026, tanggal 5 Januari 2026 sehubungan dengan telah terbitnya Salinan risalah lelang Nomor 319/16.1/2025- tanggal 1 Desember 2025
- Terdapat surat Usulan Permohonan Penghapusan BMN berupa Rumah Negara dan Kolam Nomor B.1491/POLTEK.BTG/PL.750/X/2025, tanggal 8 Oktober 2025, sampai saat ini masih berproses di SIMAN

Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Jenderal

Berdasarkan aplikasi SIDAK KKP, temuan sampai dengan akhir tahun 2025 semuanya telah ditindaklanjuti dengan status **TUNTAS**.

Adapun rincian temuan sbb :

